

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Gunawan, Tauda, 2012, *Komisi Lembaga Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Press, Yogyakarta.

Alder, John, 1989, *Constitutions and Administrative Law*, The Macmillan Press LTD, London.

Arifin, Zainal Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen; Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penantaannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.

Arikunto, 1990, *Prosedur Penelitian*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.

Ashary, 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta.

Assidiqqie, Jimly 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konpress, Jakarta.

-----, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta.

-----, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta.

-----, 2012, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta.

Azwar, Azrul 1996, *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan: Aplikasi Prinsip Lingkaran Pemecah Masalah*, Sinar Harapan, Jakarta.

Basuki, Nur W. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Budiarjo, Miriam, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi: Cetakan Ketiga, PT Gramedia Utama, Jakarta.

- Budiono, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-
Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya
Bakti, Bandung.
- Dunsire, A.,1978, *Control in a Bureacracy*, New York.
- Efendie, Paulus, Lotulung, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum
terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1994, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*,
Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Erwin, Johan dan Bagus Sarnawa, 2010, *Etika Birokrasi dan Pelayanan Publik*,
Labhukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Etzioni, A., 1968, *The Active Society: a Theory of Societal dan Political Proses*,
London.
- Fachruddin, Irfan, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan
Pemerintah*, PT. Alumni, Bandung.
- Farida Maria, Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi
Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- , 2010, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Jilid
II*, Kanisius, Yogyakarta.
- F.A.M. Stroink yang telah diterjemahkan oleh Ateng Syafrudin, 2006, *Pemahaman
tentang Dekonsentrasi*, Refika Aditama, Bandung.
- F. William, Fox, Jr., 2000, *Understanding Administartive Law*, Fourth Edition, Lexis
Nexis, USA.
- F. William Funk dan R.H. Seamon, *Administrative Law: Example and Explanations*,
Apen Law & Business, Printed in the United States of Amrecia, New York.
- Fuady, Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, PT. Reflika Aditama, Bandung.
- Hakim, Lukman, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah,: Perspektif
Teori Otonomi dan Desentralisasi dalam Peneyelnggaraan Pemerintah Negara
Hukum dan Kesatuan*, Setara Press, Malang.

- , 2012, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, Puskaki Universitas Widyagama Malang dan Setara Press, Malang.
- Handayani, Soewarni, 1980, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.
- H.M, Thalbah & Sobirin Malia, 2001, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia*, Cetakan I, Total Media, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul 2007, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta.
- , 2010, *Ilmu Negara Hukum*, Cetakan II, Rajawali Pers, Jakarta.
- Imar, Aminuddin, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta.
- Indroharto, 2003, *Usaha Memahami Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Islamy, Irfan 1986, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Isra, Saldi 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Model Legislasi Parlemen dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Juniarso, Ridwan & Sodik, Achmad S, 2010, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung.
- Kaloh, J. 2007, *Mencari Bentuk Otonomi daerah Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*, Asdi Mahasadya, Jakarta.
- Kansil, ¹CST. Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Kamis, Margito, 2014, *Jalan Panjang Konstitusionalisme Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Kelsen, Hans, 1961, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York.
- Kencana, Inu Syafeii, dkk, 1999, *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Kusnardi, M. dan Ibrahim, Harmaily, 1980, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Kusnardian, Moh. Bintang Saragih, 2000, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali, 2010, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan, Bagir & H.M. Marzuki Laica, 2008, *Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Cetakan II, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Mahfud MD, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Mahmud, Peter Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan.2, Kencana, Jakarta.
- Marbun, SF. dkk, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi*, UII Press, Yogyakarta.
- Masturi, Budhi, 2005, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Meny, Yves dan Andrew Knapp, 1998, *Government and Politic in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, 3rd Edition, Oxford University Press, Oxford.
- Mertokusumo, Soedikno, 2008, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- M. Philipus Hadjon., 1987, *Perlindungan Hukum terhadap Rakyat*, Binar Ilmu, Surabaya.
- Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Cetakan Ke-IV, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

- Mukhtie A. Fadjar, 2003, *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik, In-Trans*, Malang.
- , 2004, *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media dan In-Trans, Malang.
- Nogi, Hessel Tangkilisan, 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Jakarta.
- Nugroho, R. 2008, *Publik Policy. Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses Kbeijakan, Perumusan, IMplementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik sebagai The Fifth Estate – Metode Penelitian Kebijakan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Nurtjahjo, Hendra 2005, *Ilmu Negara, Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ode, La, Husen, 2009, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, UMITOHA, Makassar.
- O. Notohamidjojo, 1967, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta.
- , 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ridwan, Muhammad Indra, 1987, *Kedudukan Lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ronny, Tubagus Rahman Nitibaskara, 2002, *Paradoksal Konflik dan otonomi Daerah, Sketsa bayangbayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*. Peradaban, Jakarta.
- S. Donald, Lutz, 2006, *Principle of Constitutional Design*, Published in The United State of America by Cambridge University Press, New York.
- Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Pemerintah yang Baik) Bagian Kedua; Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas*

Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik), Mandar Maju, Bandung.

Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, 2012, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang.

Situmorang, Chazali, 2013, *Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia Transformasi BPJS: "Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan"*, Cinta Indonesia, Depok.

Soehino, 2000, *Ilmu negara*, Liberty, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

-----, dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subarsono, AG, 2005, *Analisa Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Suharto, Edi, 2009, , *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Alfabeta, Bandung.

-----, 2013, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Alfabeta, Bandung.

Sulastomo, 2011, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Mewujudkan Amanat Konstitusi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Sutiyoso Bambang dan Hastuti, Sri Puspita Sari, 2004, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Sri, H.R. Soemantri M., 1987, *Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh UUD 1945*, Alumni, Bandung.

Syahrini,,Riduan 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Thabrany, Hasbullah, 2014, *Jaminan Kesehatan Nasional*, Rajawali Press, Jakarta.

Utrecht, E., 1957, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, NV Bali Buku Indonesia, Jakarta.

-----, 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Tinta Emas, Surabaya.

W. Nelson Polsby, 1986, *Congress and The Presidency*, Fourth Edition, Printed in the United States of America, by Prentice hall, New Jersey.

Wibowo, Edi, Mira Subandini dan Hessel Nogi T, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta.

Widodo,Joko, 2001, *Good Governance*, Insan Cendikia, Surabaya.

Yazmi, Didi, Yunaz, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang.

Zaini, Hasan Z. 1974, *Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DJSN

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggara Program JKN.

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2008 Pengangkatan DJSN

Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Merangkap Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

Peraturan DJSN Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengawasan DJSN terhadap BPJS

Peraturan DJSN Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Program JKN

Peraturan DJSN Nomor 01 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Integrasi Program Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam Program JKN

Tesis/Disertasi, Jurnal/Publikasi, Makalah, dan Majalah

Alfan Alfian, 2017, Grand Design Penyelesaian Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara yang Kewenangannya tidak ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, *Tesis*: Universitas Gadjah Mada.

Ani Zuraida, 2017, Pelaksanaan Pemenuhan Syarat Kredensialing dan Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri omor 71 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Yogyakarta, *Tesis*: Universitas Gadjah Mada.

Arifin, Firmansyah, dkk (Tim Peneliti) Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, KRHN bekerja sama dengan MKRI didukung oleh The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, Juni 2005.

Arif Wibowo, 2015, Fungsi Kepala Daerah Kabupaten Sanggau dalam melakukan Pengawasan di Bidang Pendidikan di Kabupaten Sanggau (Sekolah Menengah Atas), *Tesis*: Universitas Gadjah Mada.

Asih Eka Putri, 2014, *Seri Buku Saku-1: Paham SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia.

Bunyamin alamsyah dan Uu Nurul Huda, Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 1 Maret, 2013.

Deka Nanda Prakoso, 2016. “Hak Konstitusional Jaminan Kesehatan dalam Pelaksanaan Program Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) dalam Perspektif Hukum”, *Skripsi*: Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tidak dipublikasikan, Bandar Lampung.

Fabrizio Gilliard, 2001, “Principal-Agent Models Go to Europe: Independent regulatory Agencies as Ultimate Step of Delegation”, (UK), *Panel 11-8: Principal-Agency Institutional Realtions*.

Frank Vibert, “Independence agencies, No Fixed Boundaries:”, dalam *Regulatory Agencies Under Challenge*, edited by Martin Lodge, *Discysson paper* No. 81, 2016.

Gandhi Ahmad, dkk, *Berbenah Melawan Kebocoran Anggaran*, Majalah Gatra Edisi XXVI 3 Mei 2017.

Gunawan Abdullah Tauda, 2011, Kedudukan Komisis Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Tesis* : Universitas Gadjah Mada.

Hasbullah Thabrany, *Kembali ke Khittoh JKN*, dalam Diskusi Panel Stakeholder Jaminan Kesehatan Nasional, Jakarta, 12 Desember 2017

Hendrik Salmon, 2011, “Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara.”, *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Heidermarie, Wieczorek-Zeul, 2005, “*Social Health Insurance in Development Cooperation*” dalam Jens Holst and Assoa Brandrup-Lukanow (eds), *Extending Social Protection in Health: Developing Countries’ Experiences, Lesson Learnt and Recommendations*, Frankfurt: Verlag Fur Akademische Schriften.

Inas Sofia Latief , 2015, “Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengawasan Penyelenggaraan Program Jaminan

Kesehatan Nasional”, *Tugas Akhir*: D3 Hukum (Vokasi), Tidak dipublikasikan, Yogyakarta.

Majalah Parleментарia, 2016, *Audit dan Modernisasi BPJS Kesehatan*, Edisi : 135 TH- XLVI.

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Nur Nisahairini, 2015, *Satu Tahun Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional*, Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.

Pansunu Perwitasari, 2013, *Kendali Biaya Kebijakan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta*, *Tesis*: Universitas Gadjah Mada.

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegheid)*, dalam *Pro Justitia*, Majalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung. No. 1 Tahun XVI, 1998.

Putri Listiani, 2017, “Perbandingan Hambatan Finansial pada Sebelum dan setelah Jaminan Kesehatan Nasional Di Indonesia”, *Tesis*: Ilmu Kesehatan Masyarakat, Tidak dipublikasikan, Yogyakarta.

Rismawati, 2010. *Studi Evaluasi: Sistem Penyelenggaraan Program JKN oleh BPJS Kesehatan dalam memberikan jaminan Kesehatan*, *Skripsi*: Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Tidak dipublikasikan, Yogyakarta.

Rizki Ramadani, *Independensi Lembaga Negara Independen (Studi dalam Konsep Independent Regulatory Agencies)*, *Tesis*: Universitas Gadjah Mada.

Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N.A.M Sihombing, “Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial”, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol.9 No.2*, 2012.

Saldi Isra, (2013), “Meluruskan Kuasa DPR” Opini pada *Harian Kompas*, 4 Oktober 2013.

Sulistiyani Susy, 2007, *Kendala Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Lahan Kompensasi dalam Proses Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Usaha Pertambangan*, *Tesis*: Universitas Gadjah Mada.

Suparjan dan Sunyoto Usman, 2006, Pelayanan Kesehatan di Era Otonomi Daerah: Penelitian di Kabupaten Sleman. *Jurnal; Sosiosains*. Vol 19, No 3. Juli 2006.

Tangcharoensathien, 2007, Achieving Universal Coverage in Thailand: What Lessons Do We Learn, A Case Study Commissioned by The Health Systems Knowledge Network, *paper*.

Tonang Dwi Ardyanto, *RS dan JKN: Keuangan dan Kinerja Pelayanan*, dalam Diskusi Panel Stakeholder Jaminan Kesehatan Nasional, Jakarta, 12 Desember 2017

Trisna Widada, 2017, Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Implikasinya terhadap Kesehatan Masyarakat, *Tesis*: Universitas Gadjah Mada.

Usman Sumantri, *Peran DJSN dalam Tata Kelola Jaminan Kesehatan Nasional*, dalam Diskusi Panel Stakeholder Jaminan Kesehatan Nasional, Jakarta, 12 Desember 2017

Zainal Arifin Mochtar Husein, dkk., “Efektifitas Sistem Penyeleksian Pejabat Komisi Negara,” *Final Report Penelitian*, Kemitraan Partnership, 2008.

Website/Online

Febri Hendri dan Wana Alamsyah, (2017), Tren Korupsi Kesehatan: Obyek Korupsi Kesehatan Bergeser Dari Korupsi Obat Ke Korupsi Jaminan Kesehatan, <http://www.antikorupsi.org/id/content/tren-korupsi-kesehatan-obyek-korupsi-kesehatan-bergeser-dari-korupsi-obat-ke-korupsi-jaminan> diakses pada tanggal 20 Juli 2017.

Indopos.co.id , (2016), Tingginya Tunggakan Klaim BPJS, Banyak Pasien Kritis di RS, <http://www.jamsosindonesia.com/newsgroup/selengkapnya/tingginya-tunggakan-klaim-bpjs-banyak-pasien-kritis-di-rs-9632> diakses pada tanggal 11 Maret 2016.

Inggried Dwi W, (2015), DPR Terlalu Fokus Urusi Rekrutmen Pejabat, Tetapi Tak Fokus Kerja Legislasi, <http://nasional.kompas.com/read/2015/09/11/06274581/DPR.Terlalu.Banyak.Urusi.Rekrutmen.Pejabat.tetapi.Tak.Fokus.Kerja.Legislati>. Diakses 01 Maret 2017.

Humat Sekretariat Kabinet RI, (2014), Termasuk Komisis Hukum Nasional, bubarkan 10 Lembaga Non Struktural. <http://setkab.go.id/termasuk-komisi-hukum-nasional-presiden-jokowi-bubarkan-10-lembaga-non-struktural/> diakses 7 Maret 2017.



**KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (DJSN) DALAM
PENGAWASAN TATA KELOLA PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) YANG DISELENGGARAKAN OLEH BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) KESEHATAN**

TRI AKTARIYANI, Dr. Diah Ayu Puspadari, Apt.,MBA.,M.Kes

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Laksono Trisnantoro, Beberapa Opsi Kebijakan Strategis untuk Perbaikan Jaminan Kesehatan Nasional, *Policy Brief No. 01/Oktober/2017*, PKMK, FK UGM. www.kebijakankesehatanindonesia.com

Muhammad Ilham Hermawan, (2017), “Konsep tentang Lembaga Negara Penunjang (Komisi Negara)”, Format HTML, URL: <http://ilhamendra.wordpress.com/2009/02/19/1konsep-tentang-lembaga-negara-penunjang/> diakses pada tanggal 7 Februari 2017.